



# JURNAL ILMIAH SY'AR

**KAJIAN DAKWAH DAN WACANA ISLAM**

*Vol. 19, No. 01, Januari - Juni 2019*



# JURNAL ILMIAH SYIAR

KAJIAN DAKWAH DAN WACANA ISLAM

Vol. 19, No. 01, Januari - Juni 2019

## MITRA BESTARI

Khomsyahrial Romli (*UIN Raden Intan Lampung*)

Nelly Marhayati (*IAIN Bengkulu*)

Andi Dermawan (*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*)

Bayu Mitra Aditya Kusuma (*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*)

## PENANGGUNG JAWAB

Suryani

## REDAKTUR

Pebri Prandika Putra

## EDITOR

Ihsan Rahmat

## SEKRETARIS

Haqqi Annazili

## DESAIN GRAFIS

Hymawandra

## ALAMAT REDAKSI

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Jl. Jalan Raden Patah, Kelurahan, Pagar Dewa, Selebar, Pagar Dewa, Selebar, Kota  
Bengkulu, Bengkulu 65144, Telp.

<http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/syiar>

## PENGANTAR REDAKSI

Alhamdulillah, *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, Vol. 19, No. 1 telah terbit tepat pada waktunya. Redaksi bersyukur ke hadirat Allah SWT atas seluruh karunia yang telah diberikan, baik yang terlihat ataupun kasat mata. Kemudian, shalawat beserta salam semoga tercurah bagi Nabi Muhammad SAW. Seorang rasul yang mempraktikkan berbagai metode dakwah bagi umat seluruh alam. Pada edisi ini, *Jurnal Ilmiah Syi'ar (JIS)* mengalami banyak pembenahan dalam rangka menuju akreditasi. Perubahan pertama datang dari ukuran jurnal cetak yang dianggap terlalu besar, sehingga redaksi memutuskan untuk menyesuaikan seukuran buku standar ISBN. Menetapkan waktu terbit dua kali dalam satu tahun, yakni edisi Januari – Juni diterbitkan pada Juni dan Juli – Desember diterbitkan pada Desember. Satu edisi berisi delapan jurnal berkualitas yang dikelola dengan sistem *Open Journal System (OJS)*.

Pada edisi ini juga, redaksi bekerja sama dengan mitra bestari yang dinilai pakar pada salah satu fokus JIS, yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam, Manajemen Dakwah, Pengembangan Masyarakat Islam, Bimbingan Konseling Islam, dan Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya, menyediakan logo khusus untuk JIS dengan tujuan mudah dikenali dan profesionalisme. Logo didesain dengan karakter tulisan 'JIS' berbentuk bulat bermakna bahwa Syi'ar Islam diperuntukkan bagi umat seluruh alam. Dakwah tidak membedakan suku, ras, agama, bangsa, dan negara. Kemudian, di luar karakter ada simbol orang yang saling bergandengan bermakna pola baru Syi'ar Islam di masa depan dengan model kolaboratif. Redaksi berpandangan bahwa kompleksitas kehidupan umat tidak mampu lagi diselesaikan dengan cara parsial atau metode dakwah perorangan.

Metode syi'ar Islam tidak mungkin dipisahkan dari sunnah Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Tulisan pertama mengangkat pembahasan tentang '*Manajemen Baitul Mal pada Masa Khalifah Umar Bin Khathab R.A: Sebuah Tinjauan Sejarah.*' Fitmawati sebagai penulis tunggal telah banyak menelusuri proses terbentuknya baitul mal di madinah, sumber dana yang bisa menjadi pemasukan, tata cara pembagian, hingga hal teknis lainnya. Kajian ini ternyata juga mampu menjelaskan sistem ekonomi syariah di masa khalifah kedua. Tulisan kedua berupa pemikiran tentang konseling Islam berjudul '*Konselor dalam Penguatan Nilai dan Moral: Strategi Membentuk Generasi Religius*' oleh Muahammad Nikman Nasir. Nasir mempertahankan argumen bahwa di era milenial, konselor membutuhkan nash-nash agama untuk membangun moral klien atau peserta didik. Agama menjadi titik tolak sebagai sumber kekuatan, agama sebagai budaya, dan agama sebagai konteks.

Ashadi Cahyadi mengisi slot ketiga dengan pembahasan '*Pembangunan dan Pemberdayaan Manusia melalui Dana Desa: Pola dari Masa Lalu hingga Sinergitas yang Rancu.*' Asumsi studi ini adalah sinergitas infrastruktur diikuti dengan pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan

kesejahteraan yang berkelanjutan. Tetapi temuan mengatakan rasionalitas ini dinilai tidak berjalan bersamaan karena memberikan porsi yang besar untuk infrastruktur dan mengesalkan pemberdayaan manusia. Tulisan keempat milik Sifatul Aliyah dan Bayu Mitra A. Kusuma '*Tuntutan Kinerja dalam Keterancaman Kerja: Dilema Karir Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil.*' Penulis banyak mengeksplor tentang keresahan penyuluh agama, langkah propaganda, hingga kebijaksanaan yang telah dikeluarkan pemerintah. Tulisan kelima berjudul '*Falsafah Huma Betang di Kalimantan Tengah: Sebuah Pergulatan Identitas Konselor Dayak Muslim*' oleh Dody Riswanto. Dody menemukan konselor dayak muslim terbentur oleh persepsi negatif dari lingkungan sosial. Kemungkinan latar agama menjadi arus utama yang perlu dipertimbangkan untuk lingkungan Dayak yang rerata menganut agama berbeda. Penyelesaian Falsafah Huma Betang yang mengandung nilai-nilai toleransi dan saling menghargai antar pemeluk agama dinilai sebagai jembatan yang mampu mereduksi persepsi negatif.

Tulisan keenam berjudul '*Sumber Daya Manusia Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di Kota Padang: Dilema antara Pengelolaan dan Pemahaman Konsep.*' M. Zaky Mubarak Lubis dan Netta Agusti menemukan bahwa 39% pengelola KJKS belum memahami konsep dasar ekonomi Islam. Robeet Thadi menjadi penulis ketujuh dengan pembahasan '*Literasi Media Khalayak di Era Keberlimpahan Infomasi di Media Massa.*' Ada pergeseran di era keberlimpahan informasi, yakni dari sulitnya mencari informasi menjadi sulitnya menyaring informasi. Thadi menekankan pentingnya kemampuan literasi media individu untuk melihat dan membedakan dunia nyata dan dunia yang diproduksi oleh media. Tulisan terakhir oleh Sugeng Sejati dengan judul '*Implikasi Egosentris dan Spiritual Remaja dalam Mencapai Perkembangan Identitas Diri.*' Temuan utamanya adalah pengembangan identitas remaja yang egosentris dan spiritual ternyata menjadikan remaja tersebut memiliki prinsip dengan peran penting dalam kehidupan dan nilai dalam masyarakat.

Demikian catatan beberapa perubahan jurnal dan cuplikan dari isi JIS Vol. 19, No. 1. Redaksi menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan. Sehingga kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan jurnal ini kedepannya. Akhirnya redaksi mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang turut mendukung lahirnya edisi ini. Mulai dari para penulis yang setia merevisi berbagai kekurangan tulisan, para mitra bestari, tim redaksi yang bekerja maksimal, dan lainnya. Redaksi menunggu karya-karya terbaik penulis pada edisi berikutnya. Selamat membaca!!!

Pagar Dewa, Juni 2019  
a.n TIM REDAKSI JIS  
Ihsan Rahmat

## DAFTAR ISI

<b>Pengantar Redaksi</b>	iii
<b>Daftar Isi</b>	v
MANAJEMEN BAITUL MAL PADA MASA KHALIFAH UMAR BIN KHATHAB R.A: SEBUAH TINJAUAN SEJARAH <i>Fitmawati</i>	1-29
KONSELOR DALAM PENGUATAN NILAI DAN MORAL: STRATEGI MEMBENTUK GENERASI RELIGIUS <i>Muhammad Nikman Nasir</i>	30-42
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MANUSIA MELALUI DANA DESA: POLA DARI MASA LALU HINGGA SINERGITAS YANG RANCU <i>Ashadi Cahyadi</i>	43-54
TUNTUTAN KINERJA DALAM KETERANCAMAN KERJA: DILEMA KARIR PENYULUH AGAMA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL <i>Sifatul Aliyah, Bayu Mitra A. Kusuma</i>	55 -67
FALSAFAH HUMA BETANG DI KALIMANTAN TENGAH: SEBUAH PERGULATAN IDENTITAS KONSELOR DAYAK MUSLIM <i>Dody Riswanto</i>	68-76
SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) DI KOTA PADANG: DILEMA ANTARA PENGELOLAAN DAN PEMAHAMAN KONSEP <i>M. Zaky Mubarak Lubis, Netta Agusti</i>	77-89
LITERASI MEDIA KHALAYAK DI ERA KEBERLIMPAHAN INFOMASI DI MEDIA MASSA <i>Robet Thadi</i>	90-102
IMPLIKASI EGOSENTRIS DAN SPIRITUAL REMAJA DALAM MENCAPAI PERKEMBANGAN IDENTITAS DIRI <i>Sugeng Sejati</i>	103-126



## PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MANUSIA MELALUI DANA DESA: POLA DARI MASA LALU HINGGA SINERGITAS YANG RANCU

Ashadi Cahyadi

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah,  
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Korespondensi dengan penulis:

Ashadi Cahyadi, 085273855995;

E-mail: ashadicahyadi@iainbengkulu.ac.id

### **Keywords:**

Community empowerment, village funds, sustainable development.

### **Abstract**

*Nawa Cita requires the village as the core of development. Funds are rolled out for each village to support the development, empowerment, and welfare of some village subjects. The main assumption is that the synergy of infrastructure followed by community empowerment will produce sustainable welfare. This rationality is considered not running together because it provides a large portion of the infrastructure and understates human empowerment. This study tried to discuss village funds by reviewing past development patterns, community development, and correcting infrastructure-based development. The discussion in this paper has been supported by various journals, figures, and news from online media. All materials are read interactively, reduced, then the essence of reading is developed according to inductive reasoning. It was found that from the past, village programs always referred to the provisions of the central government. Even though the problems and needs of each village are very different. Then, the lack of understanding of the village apparatus about the program, it is not uncommon for programs to be rolled out to be replicas from other villages. This paper also discusses community-based development as a solution to village fund problems.*

### **Abstrak**

Nawa Cita membutuhkan desa sebagai inti pembangunan. Dana digulirkan untuk setiap desa untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan, dan kesejahteraan beberapa mata pelajaran desa. Asumsi utama adalah bahwa sinergi infrastruktur yang diikuti oleh pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Rasionalitas ini dianggap tidak berjalan bersama karena menyediakan sebagian besar infrastruktur dan mengecilkan pemberdayaan manusia. Studi ini mencoba membahas dana desa dengan meninjau pola pembangunan masa lalu, pengembangan masyarakat, dan mengoreksi pembangunan berbasis infrastruktur. Diskusi dalam makalah ini telah didukung oleh berbagai jurnal, tokoh,

### **Kata kunci:**

Pemberdayaan komunitas, dana desa, pembangunan berkelanjutan



dan berita dari media online. Semua bahan dibaca secara interaktif, dikurangi, kemudian esensi bacaan dikembangkan sesuai dengan penalaran induktif. Ditemukan bahwa dari masa lalu, program desa selalu mengacu pada ketentuan pemerintah pusat. Padahal masalah dan kebutuhan masing-masing desa sangat berbeda. Kemudian, kurangnya pemahaman aparatur desa tentang program tersebut, tidak jarang program yang akan digulirkan menjadi replika dari desa lain. Makalah ini juga membahas pembangunan berbasis masyarakat sebagai solusi untuk masalah dana desa.

## PENDAHULUAN

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup> Ini berdasarkan bahwa desa memiliki hak asal, usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita UUD RI 1945. Prioritas terlihat dari lima sub kontrol, yakni sarana dan prasarana desa, sarana dan prasarana sosial pelayanan dasar, sarana dan prasarana usaha ekonomi desa, sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup, dan lainnya.<sup>2</sup> Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

**Tabel 1.** Anggaran Dana Desa Per Tahun

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Dana Penyaluran Pusat</b>	<b>Dana Penyaluran Per Desa</b>
2015	Rp. 20.700.000.000.000	Rp. 280.000.000
2016	Rp. 46.000.000.000.000	Rp. 628.000.000
2017	Rp. 60.000.000.000.000	Rp. 817.000.000
2018	Rp. 60.000.000.000.000	Rp. 863.000.000
2019	Rp. 70.000.000.000.000	Rp. 930.000.000

*Sumber:* dihimpun dari berbagai sumber.

<sup>1</sup> Pasal 1 Bab Ketentuan Umum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

<sup>2</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Kemenkeu, 2017). hlm. 23.



Dana desa muncul dalam program pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla untuk merealisasikan Nawa Cita butir ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggir. Tujuan utamanya adalah mendorong kemandirian desa, sehingga mampu menanggulangi, bahkan mengurangi kemiskinan yang laten di Indonesia.<sup>3</sup> Isu yang berkembang di awal menyampaikan bahwa besaran dana yang akan diterima sebuah desa hingga Rp. 1.000.000.000.<sup>4</sup> Hanya saja, pada tabel 1 menjelaskan bahwa penyaluran dana per desa tidak mencapai angka sebagaimana yang diinformasikan.

Mengamati risalah lahirnya program untuk desa, model program dana desa seperti ini telah banyak dilaksanakan sebelumnya. Hingga tidak mampu lagi menyebut nama-nama proyek dan berapa besaran angka yang sudah dikucurkan ke desa. Hasilnya masih jaug dari apa yang diharapkan, bahkan cenderung mempertontonkan rentetan kegagalan pemerintah dalam mengelola program pembangunan desa. Tulisan singkat ini tidak akan membahas program-program pemerintah yang gagal, lebih pada mengeksplor lebih jauh satu pertanyaan kritis, apa yang salah dari pembangunan desa di Indonesia.

Menjawab pertanyaan apa yang salah dari pembangunan desa di Indonesia, membutuhkan pembahasan dari banyak perspektif. Dalam tulisan ini penulis fokus pada perspektif pemberdayaan manusia desa. Selama ini, berdasarkan hasil penelitian Kusharjanto dan Kim menjelaskan model pembangunan desa berpusat di Jawa lebih condong pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini kemudian melahirkan model pembangunan yang bertumpu pada pembeiaan kebutuhan dasar masyarakat pada dekade 2000-an.

Kedua model di atas hanya menghasilkan masyarakat yang bermental konsumtif. Misalnya saja pembangunan perpustakaan desa di Rembang. Setelah infrastruktur terbangun dan dana habis, masyarakat menikmati hasil pembangunan, tapi apakah perpustakaan

---

<sup>3</sup> Andi Asnudin, "Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan Pelibatan Masyarakat Setempat." *Jurnal SMARTek*, Vol. 7, No. 4, 2009. Asep Suryahadi, Daniel Suryadarma, dan Sudarno Sumarto, "The Effects of Location and Sectoral Components of Economic Growth on Poverty: Evidence from Indonesia." *Journal of Development Economics*, Vol. 89, 2009. I Wayan Rusastra, "Reorientasi Paradigma dan Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Global." *Pengembangan Inovasi Pertanian*, Vol. 4, No. 2, 2011. Anthony Marcus dan Sulikha Asmorowati, "Urban Poverty and the Rural Development Bias: Some Notes from Indonesia." *Journal of Developing Societies*, Vol. 22, No. 2, 2012.

<sup>4</sup> "Dana Desa Dijamin Rp. 1 Miliar Per Desa di Tahun 2016." Diakses melalui laman <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/05/16/nog8bu-dana-desa-dijamin-rp-1-miliar-per-desa-pada-2016>





meningkatkan minat baca masyarakat? Jawaban iya untuk sementara waktu, hingga perpustakaan berhenti beroperasi, dan ini terjadi di 56 desa di Rembang. Kurangnya manajemen perpustakaan menjadi penyebab utama tidak beroperasinya perpustakaan. Misalnya lagi, pemberian dana bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat kurang mampu, yang menurut penulis program seperti ini sungguh tidak layak digagas karena memberikan efek kejut yang bersifat sementara, akan memeras APBD, dan akan menimbulkan masalah baru dalam masyarakat.

Pembangunan di Indonesia lebih membutuhkan program-program yang bersifat memberi ketahanan yang berkelanjutan bagi tiap-tiap manusia desa agar mampu bersaing ditengah carut-marut kondisi perekonomian Indonesia. Program dana desa ini menjadi salah satu harapan pembangunan desa saat ini. Penulis berargumen bahwa kegagalan pembangunan di desa disebabkan oleh fokus pemerintah daerah yang terlalu dominan ke arah fisik, yakni infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tidak diimbangi dengan pembangunan non-fisik, yakni pemberdayaan manusia desa. Artinya, manusia masih diposisikan sebagai objek pembangunan, bukan subjek. Dari argumen ini, penulis berasumsi bahwa dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat akan menjadi produktif dan berkelanjutan ketika pemerintah desa mensinergikan pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan masyarakat.

## **METODE**

Demi menjaga nilai keilmiahan sebuah karya, memastikan data-data yang digunakan relevan dengan tema, dan dapat dipertanggungjawabkan, kami menggunakan alur kerja yang sistematis. Pertama, mencari sumber bacaan yang dinilai relevan dari berita harian lokal, kebijakan pemerintah, jurnal-jurnal, hingga buku kebijakan publik. Kedua, membaca dan menyusun hasil bacaan ke dalam tabel menggunakan microsoft excel. Penulis membaca buku atau dokumen dengan teknik scanning. Ketika mendapati bagian-bagian bacaan yang dianggap relevan dengan topik bahasan, maka teknik membaca interaktif digunakan. Ketiga, Membaca interaktif memberikan kesempatan bagi kami untuk menggangkat intisari bacaan, kemudian menghubungkannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Intisari bacaan kemudian disalin ke dalam tabel yang sebelumnya telah dibagi ke dalam beberapa kolom (sesuai kebutuhan, berisi kolom judul, penulis buku, intisari bacaan, halaman bacaan, kata kunci, kategorisasi, pentemaan).



Keempat, mereduksi data hasil pembacaan atau intisari. Maksudnya adalah saat memasuki kerja pentabelan, penulis kembali membaca dengan seksama intisari bacaan guna memahami isi teks secara menyeluruh, melihat kesamaan atau perbedaan ide antar ahli, dan mempermudah penulis untuk melakukan tahap pentemuan. Kemudian melakukan tahap pencarian kata kunci untuk setiap intisari bacaan. Kata kunci tersebut kemudian dikategorisasi berdasarkan kesamaan dengan kata kunci dengan bacaan lain. Terakhir adalah membuat tema-tema besar dari hasil kategorisasi. Tema-tema inilah yang nantinya menjadi sub-bab pada bagian pembahasan. Alur seperti ini diyakini akan menghindari penulis dari bias dalam pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Belajar dari Masa Silam

Usaha jangka panjang dalam pembangunan, bagaimanapun harus dipikirkan secara strategis. Titik permulaan yang harus dianalisa dalam pembangunan desa dengan struktur yang tidak sehat adalah memahami sifat masalah pengembangan pedesaan itu sendiri. Selama ini program-program pembangunan desa tidak berlandaskan pada apa yang dibutuhkan masyarakat, melainkan program apa yang sesuai dengan dana yang ada, bahkan lebih celaka lagi jika program yang dibuat adalah replika dari program desa lain. Karena itu ada beberapa hal yang perlu dicermati dari kegagalan di masa lalu: *Pertama*, mengkonstruksi desa melalui pembangunan infrastruktur. Masih ingatkan dengan bantuan *block grant* Rp. 2,7 triliun dari Bank Dunia kepada Pemprov DIY? Dana itu digunakan sepenuhnya untuk pembangunan fisik berupa pembangunan transportasi, wisata, pertanian, dan industri. Dengan dalih mempercepat pembangunan. Pemerintah kurang memperhatikan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, DIY tetap menjadi provinsi termiskin di pulau Jawa. Sampai saat ini pendekatan pembangunan, termasuk pendekatan kesejahteraan sosial, masih condong kepada pendekatan materialistik. Perkataan Marwan Ja'far sebagai Menteri yang membidangi masalah desa dan daerah tertinggal, sudah cukup untuk membuktikan pandangan penulis.



"Dana desa yang sudah diterima desa langsung digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur desa seperti jalan desa, irigasi, jalan usaha tani, sanitasi, embung, dan lainnya, hal ini besar sekali dampaknya terhadap pemulihan ekonomi desa yang tadinya ikut terkena imbas melambatnya perekonomian nasional,"<sup>5</sup>

Kedua, program masa lalu menjadikan manusia desa sebagai objek pembangunan. Jika pembangunan diartikan sebagai proses perubahan sosial yang direncanakan,<sup>6</sup> maka harusnya pembuat kebijakan bisa memutar kanal program pembangunan desa ke arah pemberdayaan masyarakat. Ada konsep *community based development* yang bisa menjadi landasan pembangunan desa, tapi entah kenapa pemerintah terkesan memandang sebelah mata konsep ini.<sup>7</sup> Di sub berikutnya, penulis akan membahas konsep ini agar nantinya kita memiliki pandangan bahwa pembangunan itu tidak harus selalu bertumpu pada infrastruktur.

Ketiga, pembelajaran berharga yang tidak boleh terulang kembali adalah pendekatan *trickle-down effect* yang diadopsi oleh pemerintahan Orde Baru. Konsep pendekatan ini sejalan dengan konsep *pareto optimal*, yang memberikan kesempatan kepada segelintir orang atau golongan untuk menguasai ekonomi. Kemudian orang dan golongan inilah nantinya yang akan *sharing power* kepada golongan lain. Sen menjelaskan bahwa pendekatan *pareto* dan *trickle-down effect* akan membuat ketimpangan sosial yang sangat dalam. Sen juga berpandangan bahwa ketidakmerataan menjadi penghalang bagi kebebasan individu.<sup>8</sup> Dari pandangan ini Sen mengidentifikasi lima ciri masyarakat sejahtera itu ketika masyarakat memiliki peluang ekonomi yang sama, kebebasan politik, peluang sosial (yaitu, hak untuk menikmati hidup sehat, lebih terdidik, dan lebih terpenuhi kehidupan), transparansi (seperti dalam hukum dan bisnis), dan pelindung keamanan seperti kebebasan dari kejahatan dan agresi.<sup>9</sup>

Keempat, perencanaan pembangunan Indonesia secara garis besar didikte oleh pemerintah pusat (sentralistik), sedangkan daerah (desentralistik) hanya menampung gagasan pemerintah

---

<sup>5</sup> "Marwan Jafar Optimis Dana Desa Pulihkan Perekonomian Nasional." Diakses dari laman <http://m.tribunnews.com/nasional/2015/09/26/marwan-optimis-dana-desa-pulihkan-perekonomian-nasional>.

<sup>6</sup> Alberta Andreotti dan Enzo Mingione, "Local Welfare Systems in Europe and the Economic Crisis." *European Urban and Regional Studies*, Vol. 23, No. 3, 2014. hlm. 1-15.

<sup>7</sup> Lee L. Mason, Jessica Perales, dan Eric Gallegos, "Community-Based Development of Rural Behavior Analysts." *Rural Special Education Quarterly*, Vol. 32, No. 3, 2013. hlm. 20-23.

<sup>8</sup> dalam Robert McDonald, "Sustainable Development as Freedom." *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*. Vol. 13, No. 6, 2013. hlm. 445-447.

<sup>9</sup> dalam Alfred Ndi, "Why Liberal Capitalism Has Failed to Stimulate a Democratic Culture in Africa Rethinking Amartya Sen's Theory about Development as Freedom." *Journal of Developing Societies*, Vol. 27, No. 2, 2011. hlm. 177-200.



pusat kemudian meneruskannya menjadi program-program untuk membangun masyarakat. Apakah model ini tepat? Penulis mengatakan ini tidak tepat. Pemerintahan yang sentralistik akan membuat kebijakan yang sifatnya pukul rata, sedangkan tingkat di daerah tidak seluruhnya memiliki daya tangkap yang sama seluruh Indonesia. Banyak cacat program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah, itu karena SDM yang tidak mampu menerjemahkan keinginan pemerintah pusat. Bahkan hingga sekarang, masih banyak pemerintah daerah yang *gelagapan* dalam membuat RPJM atau RPJP desa, BUMDES, dan membaca faktor “x” yang bisa dikembangkan di desa. Hal-hal seperti inilah yang mengakibatkan munculnya politik *copy-paste* program desa lain dan membangun seadanya.

### ***Community Based Development***

Pembangunan di masa lalu memberikan satu penjelasan kepada kita, bahwa pembangunan bukan menghasilkan masyarakat desa yang sejahtera, adil dan makmur; materil dan spirituil, melainkan baru menghasilkan beberapa anggota masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Maka dalam program dana desa yang baru bergulir sekarang ini harus ada manajemen pembangunan subsistem yang menetralsir ketidaksempurnaan itu. Subsistem tersebut harus benar-benar membaca apa yang bisa dikembangkan di desa (bukan apa yang diinginkan desa) dan fokus pada mereka-mereka yang kalah; mereka yang tidak mampu mengambil manfaat dari pembangunan itu sendiri, baik karena faktor struktural, kultural, maupun fiskal. Ini berarti komplementer terhadap paradigma pembangunan yang sudah ada. Pendekatan itu adalah pendekatan yang membangun desa dari pemberdayaan rakyat atau lebih dikenal dengan istilah *community based development*.

David Korten menyebut ciri-ciri dari masyarakat *community based development*, sebagai berikut: (1) logika yang dominan dari paradigma ini adalah logika mengenai satu ekologi manusia yang seimbang; (2) sumber daya utama berupa sumber-sumber informasi dan prakarsa kreatif yang tidak ada habis-habisnya; (3) tujuan utamanya adalah pertumbuhan manusia yang didefinisikan sebagai perwujudan yang lebih tinggi dari potensi manusia.<sup>10</sup>

Selain yang telah disebutkan oleh Korten, Tjokrowinito menambahkan tiga hal lagi, yakni: (1) prakarsa pengambilan keputusan bukan di tangan pemerintah pusat, masyarakat itu sendiri lah yang lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhannya; (2) pendekatan ini mentoleransi variasi

---

<sup>10</sup> David Korten. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988). hlm. 374.



lokal, karenanya harus flexible menyesuaikan dengan kondisi tiap lokal; (3) harus memiliki jaringan (*networking*) antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas aras lokal untuk membuat proses perencanaan hingga tahap evaluasi.<sup>11</sup> Pandangan Korten dan Tjokrowinito ini memberi peran pembangunan yang berpusat pada rakyat dengan asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis. Bukan menempatkan individu-individu pembangunan sebagai objek, melainkan harus diikuti keterlibatannya dalam pembuatan keputusan atau proses perencanaan pembangunan, atau masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama yang harus menentukan jalannya pembangunan.

Sebenarnya model *community based development* ini pernah dilakukan di tahun 1990-an dengan istilah penghidupan desa berkelanjutan (*sustainable rural livelihood*). Dalam tulisan Cambers dan Conway tentang "*Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts fo 21<sup>st</sup> Century*", mengungkapkan pembangunan harus berpusat pada manusia (*human-centered*), pendekatan *holistic*, kehidupan *dynamic*, *building on strengths*, dan keterkaitan makro dan mikro dalam perubahan dan pengembangan (*micro-macro link*).<sup>12</sup> Konsep Cambers dan Conway ini sangat bagus, tetapi gagal diterjemahkan dalam konteks ke-Indonesiaan. Apa yang menyebabkan kegagalan? Sebagaimana diketahui, di tahun 1990-an, masyarakat Indonesia -terlebih yang hidup di pedesaan- memiliki cara pandangan yang kolot, jauh dari kata pengetahuan. Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan: (1) tidak adanya pendampingan yang eksklusif; (2) modal sosial yang rapuh dalam hal jaringan untuk mengatasi keterbatasan modal materil; (3) kesulitan dalam membongkar sosial-kultur orang lokal sebagai kekuatan yang mengontrol perilaku miskin, seperti pandangan yang pragmatis tentang pembangunan dan budaya ketergantungan pada pemerintah.

Agar program dana desa ini berjalan dengan landasan *community based development* atau *sustainable rural livelihood*, kita perlu menengok kesuksesan Grameen Bank dalam menginisiasi penguatan modal sosial kaum miskin untuk bersama-sama memecahkan kemiskinan: kredit dari Grameen Bank dikelola dengan baik oleh setiap anggota karena dikenakan aturan bahwa

---

<sup>11</sup> Moeljarto Tjokrowinito, *Politik Pembangunan*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987)

<sup>12</sup> Robert Chamberdan Gordon Conway, "*Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts fo 21<sup>st</sup> Century*." *IDS Discussion Paper*, 1992. hlm. 291-308



kredit yang menunggak akan menyulitkan anggota lain untuk mendapatkan kredit.<sup>13</sup> Formula pertama ini mengajarkan cara membongkar sosial-kultur kemiskinan yang melekat melalui metode partisipatif. Formula kedua ini satu sisi untuk memanfaatkan secara positif kebiasaan orang miskin saling bergantung ke sesamanya, di sisi lain akan menghilangkan budaya oportunitas negatif pada diri individu kaum miskin yang didesak oleh kemiskinan sehingga berani mengorbankan kepercayaan dari pihak luar.<sup>14</sup> Para peneliti World Bank juga belajar dari Grameen Bank bahwa penguatan modal sosial dapat menjamin kredit yang mereka cururkan dapat kembali dengan baik.

Selain Grameen Bank, desa Saemaul Undong juga menerapkan konsep penghidupan yang berkelanjutan di desa, dengan masyarakat sebagai pusat pembangunan. Dalam penelitian Baik dkk menjelaskan bahwa desa Saemaul Undong merupakan desa percontohan yang sengaja di bangun pemerintah Korea Selatan untuk mengentaskan kemiskinan dengan model partisipatif dari masyarakat lokal. Ini bisa menjadi percontohan bagi desa-desa di Indonesia.<sup>15</sup>

### **Sinergitas Pembangunan**

Pembangunan yang berkelanjutan menjadi kata yang memikat perhatian tetapi sulit untuk diterapkan. Bahkan untuk menghasilkan suatu model yang idel bagi masing-masing desa, dibutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Proses yang lama dan biaya yang besar itupun telah menimbulkan efek negatif, seperti: timbulnya individualisme ekstrem yang memegang kesejahteraan dalam desa, keretakan prinsip-prinsip keluarga, tercabutnya akar-akar budaya lokal, memudarnya nilai-nilai spiritual yang memberi mutu dan makna hidup, penggunaan materi yang berlebihan dan waktu luang yang tidak wajar, serta pencemaran lingkungan. Tentu sebagai manusia kita harus terus dan terus mencoba mengupayakan sesuatu model yang ideal.

Model pembangunan berbasis infrastruktur itu baik, tetapi bukan berarti itu ideal untuk masyarakat desa. Memang selama ini cara pandang kita yang salah pada pembangunan desa.

---

<sup>13</sup> Abul Basher, "Promotional Role of Microcredit: Evidence from the Grameen Bank of Bangladesh." *Journal of International Development*. Vol. 22, No. 4, 2010. hlm. 521-529.

<sup>14</sup> Yasushi Suzukia, dkk, "The Grameen Bank 'Empowering the Poor' Model of Microcredit: An Institutional Comparison with the Traditional Mode of the Japanese Banking System." *Journal of Comparative Asian Development*, Vol. 10, No. 1, 2011. hlm. 129.

<sup>15</sup> Paul Collins, dkk, "Contributions and Limitations of Saemaul Undong in Korea for Regional Development and Welfare Improvement in Less Developed Countries." *Public Administration and Development*, Vol. 32, 2012. hlm. 416-429.





Perangkat desa selalu mengukur kesuksesan program kerjanya dari infrastruktur yang ada. Apa yang telah ia bangun dan apa yang telah dimanfaatkan masyarakat dari pembangunan, menjadi *magnum opus* dalam memberikan pertanggung jawaban diakhir masa jabatan. Ini sesat pikir yang membudaya di desa. Dan karena tingkat pendidikan yang rendah, masyarakat desa memberikan apresiasi yang tinggi atas pembangunan infrastruktur. Masyarakat jarang memikirkan “dari infrastruktur yang ada, apa kesejahteraan ekonomi sudah merata?” atau “dengan adanya infrastruktur, berapa banyak sektor produktif yang terbuka dan bagaimana mengembangkannya?” pertanyaan semacam ini jarang sekali muncul. Saat infrastruktur terbangun, uang kas desa habis, masyarakat menikmati hingga saat infrastruktur mengalami kerusakan dan tidak ada manajemen perawat karena masyarakatnya ditempa untuk bermental konsumtif tanpa pemberdayaan? Inilah yang menurut penulis cikal bakal bertambahnya kemiskinan di Indonesia ini. Mental konsumtif selalu dipupuk, pemberdayaan masyarakat ada tapi hanya bersifat periodik. Ini terbukti dari hasil penelitian Kusharjanto dan Kim (2011) menjelaskan infrastruktur Indonesia porak-poranda setelah dihantam badai krisis 1997-1998, keuangan negara tidak menopang infrastruktur yang ada.

Karena itu, dana desa yang baru bergulir ini harus mensinergikan pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan masyarakat. Ini menjadi sesuatu hal yang mutlak untuk dilakukan. Ketika ini tidak diseimbangkan, pola kesejahteraan akan tetap stagnan. Keduanya tidak bisa dipisahkan, saling menopang satu sama lain. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama. Jika kesejahteraan infrastruktur mengacu pada ukuran materil, maka pemberdayaan masyarakat merupakan ukuran yang imateril. Sinergitas ini akan berdampak pada:

- (1) Kesimbangan pembangunan dan manajemen perawatan;
- (2) Pembangunan infrastruktur akan membuka sektor-sektor produktif, dan pemberdayaan masyarakat menjadi penopang keberlanjutan;
- (3) Timbulnya jaringan-jaringan individu yang membentuk komunitas atas dasar kebutuhan bersama;
- (4) Dana kas desa akan memiliki pemasukan sebagai eksternalitas positif dari keberlanjutan sistem kesejahteraan; dan
- (5) Menghasilkan individu-individu yang terampil, mampu menjawab tantangan zaman karena telah didukung oleh infrastruktur, pemberdayaan, dan jaringan modal sosial yang kuat.



## KESIMPULAN

“Kegagalan” di bidang pembangunan yang telah kita catat tadi adalah kegagalan yang dapat diperbaiki. Tidak boleh dilupakan bahwa satu atau dua dasawarsa yang lalu, negara-negara yang sekarang yang berpendapatan tinggi, pernah menghadapi kendala-kendala yang dialami negara berpendapatan sedang. Sejumlah negara berpendapatan tinggi itu telah membuat kemajuan dalam memperbaiki kesejahteraan penduduk yang berkelanjutan. Korea Selatan dan Grameen Bank yang dicontohkan tadi adalah dua dari sekian banyak program-program unggulan di dunia. Kita juga memiliki program yang bermutu: dana desa. Tinggal bagaimana kita menyatukan program ini dengan kebutuhan masyarakat yang itu memang berasal dari kata-kata masyarakat, bukan keinginan pejabat pemerintahan.

Kita percaya bahwa ketika pembangunan sudah dimulai dengan kata “tidak seimbang”, akan terulang kembali kegagalan-kegagalan pembangunan di masa lampau. Karena itu, sinergitas pembangunan harus menjadi landasan utama dalam penggunaan dana desa. Saat pemerintah kesulitan menentukan model ideal pemberdayaan masyarakat, sudah semestinya menyerahkan model itu kepada individu-individu desa (*human-centered*) bukan berusaha meneliti dan membuat kebijakan yang dirasa sesuai dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa. Kita optimis, dana desa ini akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andreotti, Alberta dan Enzo Mingione, “Local Welfare Systems in Europe and the Economic Crisis.” *European Urban and Regional Studies*, Vol. 23, No. 3, 2014.
- Asnudin, Andi, “Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan Pelibatan Masyarakat Setempat.” *Jurnal SMARTek*, Vol. 7, No. 4, 2009.
- Basher, Abul, “Promotional Role of Microcredit: Evidence from the Grameen Bank of Bangladesh.” *Journal of International Development*. Vol. 22, No. 4, 2010.
- Chamber, Robert dan Gordon Conway, “Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for 21st Century.” *IDS Discussion Paper*, 1992.
- Collins, Paul, In-Rib Baek, Pan Suk Kim, dan Soo Chul Lee, “Contributions and Limitations of Saemaul Undong in Korea for Regional Development and Welfare Improvement in Less Developed Countries.” *Public Administration and Development*, Vol. 32, 2012.





- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Kemenkeu, 2017.
- Korten, David, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Marcus, Anthony dan Sulikha Asmorowati, "Urban Poverty and the Rural Development Bias: Some Notes from Indonesia." *Journal of Developing Societies*, Vol. 22, No. 2, 2012.
- Mason, Lee L, Jessica Perales, dan Eric Gallegos, "Community-Based Development of Rural Behavior Analyts." *Rural Special Education Quarterly*, Vol. 32, No. 3, 2013.
- McDonald, Robert, "Sustainable Development as Freedom." *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*. Vol. 13, No. 6, 2013.
- Ndi, Alfred, "Why Liberal Capitalism Has Failed to Stimulate a Democratic Culture in Africa Rethinking Amartya Sen's Theory about Development as Freedom." *Journal of Developing Societies*, Vol. 27, No. 2, 2011.
- Rusastra, I Wayan, "Reorientasi Paradigma dan Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Global." *Pengembangan Inovasi Pertanian*, Vol. 4, No. 2, 2011.
- Suryahadi, Asep, Daniel Suryadarma, dan Sudarno Sumarto, "The Effects of Location and Sectoral Components of Economic Growth on Poverty: Evidence from Indonesia." *Journal of Development Economics*, Vol. 89, 2009.
- Suzukia, Yasushi, Bishnu Adhikary, Munim Kumar Barai, Manjula Kumara Wanniarachchige, "The Grameen Bank 'Empowering the Poor' Model of Microcredit: An Institutional Comparison with the Traditional Mode of the Japanese Banking System." *Journal of Comparative Asian Development*, Vol. 10, No. 1, 2011.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, *Politik Pembangunan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987.
- "Dana Desa Dijamin Rp. 1 Miliar Per Desa di Tahun 2016." Diakses melalui laman <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/05/16/nog8bu-dana-desa-dijamin-rp-1-miliar-per-desa-pada-2016>.
- "Marwan Jafar Optimis Dana Desa Pulihkan Perekonomian Nasional." Diakses dari laman <http://m.tribunnews.com/nasional/2015/09/26/marwan-optimis-dana-desa-pulihkan-perekonomian-nasional>.